

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
PADAMASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN  
(Studi kasus di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Nama : Hanan Hidayah

Nomor Mahasiswa : 144215211

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA  
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN  
(Studi kasus di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Disusun oleh :

Nama : Hanan Hidayah

Nomor Mahasiswa : 144215211

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Penulis

Hanan Hidayah

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA  
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN  
(Studi kasus di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Nama : Hanan Hidayah  
Nomor Mahasiswa : 144215211  
Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 25 Februari 2018

Telah di setujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing

Drs Muda Setia Hamid, MM , Akt

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Nama : Hanan Hidayah  
Nomor Mahasiswa : 144215211  
Program Studi : Akuntansi

Yogyakarta, Januari 2018  
Disahkan oleh

Penguji / Pembimbing Skripsi :  
Penguji 1 :  
Penguji 2 :

Mengetahui  
Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan, MM

## Abstrak

Melek finansial yang memiliki makna adalah memahami tentang keuangan, sesuai dengan strategi pembukuan buku melek finansial nasional Indonesia, bahwa pikiran dengan melek finansial adalah proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola uang yang lebih baik. Keaksaraan finansial tidak bisa datang ke masyarakat jika tidak ada obat yang harus dilakukan oleh pemerintah atau organisasi dalam sosialisasi tentang melek finansial. Sosialisasi tentang melek finansial di Indonesia dilakukan oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Perangkat jasa keuangan seperti penyelenggara industri jasa keuangan di Indonesia.

Penelitian semacam ini adalah penelitian lapangan, sebuah penelitian yang dilakukan di lokasi dengan mengamati secara cermat sesuatu tentang fenomena dalam situasi alamiah, data yang diperoleh dari penelitian wawancara seperti Kantor OJK, dalam mendapatkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan meningkatkan kualitas penelitian kualitatif yang dilakukan di kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

## HALAMAN MOTTO

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka : “Matilah kamu”, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. – Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. Al Baqarah : 243 - 244)

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati karya kecilku ni ku persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Someone in my heart.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalaamiin, pujian dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN". Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang ekonomi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya-Wiwaha. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada :

1. Drs. Muhammad Subkhan,MM, selaku Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Khoirunnisa Cahya Firdarini,M,Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Widya Wiwaha
3. Drs. Muda Setia Hamid,MM,Ak, sebagai pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan staf administrasi STIE Widya Wiwaha.
5. Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Daerah Istimewa Yogyakarta kepada kepala kantor OJK beserta karyawan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
6. Fauzi Nugroho Se,MM,Ctsi, terima kasih atas arahan dan supportnya.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta,  
22 Januari 2018

HANAN HIDAYAH

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN</b>	vi
<b>Abstrak</b>	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b>	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR</b>	x
<b>DAFTAR ISI</b>	xii
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1. Latar belakang masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	8
<b>LANDASAN TEORI</b>	8
1. Literasi Keuangan	8
A. Pengertian Literasi Keuangan	8
B. Mengapa Anda Perlu Literasi Keuangan	9
C. Dasar Literasi Keuangan	11
D. Indikator Literasi Keuangan	12
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan	13
F. Strategi Literasi Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	13
G. Tujuan Literasi Keuangan	14
H. Kajian Pustaka	15
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19
A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan	19
B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	20

C. Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan	20
<b>BAB III</b>	23
<b>METODE PENELITIAN</b>	23
1. Definisi Operasional / Rumusan Masalah	23
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23
B. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK	23
C. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	24
D. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan	25
E. Lembaga Jasa Keuangan	25
F. Literasi Keuangan	26
2. Jenis Penelitian	27
3. Jenis Data	27
4. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
5. Objek dan Subjek Penelitian	28
6. Metode Pengumpulan Data	28
7. Teknik Analisis Data	30
8. Uji Keabsahan Data	31
<b>BAB IV</b>	34
<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	34
1. Gambaran Umum OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	34
A. Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	34
B. Profil OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	34
C. Landasan Hukum OJK DIY	35
a. Landasan Filosofis:	35
b. Landasan Yuridis:	35
c. Landasan Sosiologis:	35
d. Visi dan Misi OJK DIY	36
2. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan	37
A. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	47
B. Pembentukan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang dana masyarakat dan investasi (Satgas Waspada Investasi)	51

C. Pembentukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)	52
3. Analisis Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat	53
A. Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai Program	54
B. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi melalui pembentukan program literasi keuangan	56
C. Sinergi Program atau Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak	58
BAB V	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
Kesimpulan	59
Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam Siaran Pers OJK (2017), berdasarkan survei kedua yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016, menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pada tahun 2013, yaitu indeks literasi keuangan 21,84% dan indeks inklusi keuangan 59,74%. Dengan demikian telah terjadi peningkatan pemahaman keuangan (*well literate*), meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami kenaikan, namun perlu dilakukan akselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan. Menurut Kusumastuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, akselerasi tersebut bertujuan agar target pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Wahid dalam buku 'Keuangan Inklusif' (2014:57), menyatakan bahwa data Bank Dunia (*world bank*), Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai

tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan. Karena itu, kebutuhan pengembangan keuangan mikro dan program keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang lebih efektif dan efisien. Praktik ekonomi yang *ekklusif* menjadi belenggu kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan terobosan untuk menghasilkan kehidupan ekonomi yang *inklusif*. Sistem layanan keuangan yang *inklusif* sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi kalangan berada namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin. Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas. Adapun definisi yang lebih operasional ditawarkan oleh *House of Commons Treasury Committee* yang menyebut bahwa *financial inclusion* merupakan kemampuan perorangan dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan ini utamanya berkaitan dengan satu kompleks pemahaman yang meliputi *financial awareness*, pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan dan pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan serta permohonan atas berbagai keuntungan memanfaatkan saluran perbankan pemahaman tersebut masuk dalam indikator masyarakat yang telah *well literate* dalam bentuk literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan inklusi keuangan, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, potensi menjadi korban transaksi keuangan juga akan semakin besar.

Dalam hal ini keuangan inklusif merupakan salah satu instrumen yang menunjang literasi keuangan yang mana OJK bersama IJK sendiri pada tahun 2013 telah menyusun strategi nasional literasi keuangan dan strategi nasional keuangan inklusif. Menurut Lusardi (2007) dalam penelitian Krisna (2010:552-560) literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan

tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Houston (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Remund (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi juga atribut nonkognitif. Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.

Literasi memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu, pertama meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*, kedua meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan mengenai produk lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat menentukan kebutuhan keuangan yang baik dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 19 November 2013, bahwa tingkat literasi keuangan



penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu, *well literate, sufficient literate, less literate, not literate* (<http://www.ojk.go.id>, 2017). OJK sebagai sebuah regulator keuangan meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis (OJK, 2015:3). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itulah berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan layanan keuangan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tak kalah penting edukasi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sejauh ini jarang bersentuhan dengan lembaga jasa keuangan (LJK), seperti kelompok petani, nelayan, pedagang atau lainnya. Tingkat literasi kelompok masyarakat tersebut tidak begitu bagus. Pemanfaatan jasa keuangan oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga tidak banyak. Dalam Siaran Pers OJK (2017) literasi keuangan harus dapat mengedukasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

OJK sangat intensif menstimulus masyarakat untuk mengenal dan mengerti produk-produk jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangatlah dibutuhkan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan produk/jasa keuangan. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan melalui produk dan layanannya harus

menjadi mitra bagi masyarakat dan dapat menyediakan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Itu yang akan menjadikan industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan sangatlah dibutuhkan. Dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila di dukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan *usage/manfaat* yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari dua hal itu, pada 18 Desember 2014 lalu OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemerintah meluncurkan salah satu program yakni Layanan Keuangan Mikro.

Menurut Wahid (2014), Layanan Keuangan Mikro adalah layanan terpadu yang memiliki proses sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi, investasi dan pinjaman. Oleh karena itu, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berusaha mendekatkan masyarakat salah satunya dengan melalui Layanan Keuangan Mikro. Program ini juga termasuk sebagai salah satu strategi literasi keuangan yang disusun oleh OJK dan Lembaga Jasa Keuangan.

Dengan hasil survei tersebut OJK menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang di dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta kaitannya dengan meningkatkan literasi keuangan. Untuk itu, penulis mengambil judul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Pemahaman Masyarakat

Mengenai Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan belum optimal. Dengan demikian pertanyaan penelitiannya adalah : Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan?

### **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

### **4. Manfaat Penelitian**

Memperkuat ilmu pengetahuan khususnya tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

#### **a. Bagi subyek peneliti**

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi OJK Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peningkatan literasi keuangan pada masyarakat.

#### **b. Bagi penelitian**

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

### **5. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. BAB I Pendahuluan.** Bab ini adalah latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **b. BAB II Landasan Teori.** Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep Literasi Keuangan, dan Peran OJK.

- c. BAB III Metode Penelitian. Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data-data, serta teknik analisis data.
- d. BAB IV Hasil Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yakni profil atau gambaran umum mengenai OJK DIY. Selanjutnya, menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.
- e. BAB V Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditunjukkan untuk pihak terkait baik masyarakat, OJK, mahasiswa dan sebagainya.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Literasi Keuangan

##### A. Pengertian Literasi Keuangan

Definisi literasi keuangan sangat bervariasi, seperti beberapa diantaranya, Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan *literacyfinancial* sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*Knowledge and Ability*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi berarti kesanggupan membaca dan menulis. Dalam hal finansial, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan. Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- *Well literate* (21,84 %),  
yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- *Sufficient literate* (75,69 %),  
memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- *Less literate* (2,06 %),  
hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- *Not literate* (0,41%),  
tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

## B. Mengapa Anda Perlu Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) adalah hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang dimiliki, akan dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya tidak diperbudak oleh uang (<http://www.finansialku.com>).

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan,
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (<http://www.ojk.go.id>).

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono tentang Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang

dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang OJK mengatakan bahwa hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, agar rendahnya pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu terhadap investasi-investasi bodong (www.sindonews.com). Literasi keuangan juga merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini mengandung muatan-muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting dalam sektor keuangan, tanpa bisa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan (Nusron, 2014). Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik. Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu *literasi, penetration, density, dan delivery* (Nusron, 2014).

1. *Literacy* merupakan perangkat utama dalam mewujudkan *financial inclusion*, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang di lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi *welliterate* dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk *implementasi* (OJK, 2011).

Edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dilakukan dengan menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.

2. *Penetration* merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan (Nusron, 2014) . Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah *supply side* layanan keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, *training of trainer*, edu expo.
3. *Density* merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi *Density*.
4. *Delivery* merupakan tahap dimana literasi keuangan dan *financial inclusion* sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (*delivery channel*) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, dan murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Nusron, 2014).

### C. Dasar Literasi Keuangan

Yang menjadi dasar adanya program literasi keuangan adalah adanya temuan dari data Bank Dunia bahwa tingkat akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal hanya sebesar 36,1% atau lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu pula yang menjadi alasan pentingnya literasi keuangan adalah angka rasio savings to GDP



Indonesia yaitu sekitar 31%, lebih rendah dari Singapura sebesar 49%, Filipina sebesar 46%, serta China 49% (Siaran Pers OJK, 2016).

Hal ini dipengaruhi juga tingkat literasi masyarakat Indonesia yang mana pengertian dari literasi keuangan sendiri adalah setiap orang memiliki pengetahuan yang memadai untuk merencanakan dan mengatur keuangan pribadinya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapatan seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen (*missmanagement*) keuangan (Krishna Et.al., 2010).

#### **D. Indikator Literasi Keuangan**

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84%), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06%), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat,

maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (<http://www.ojk.go.id>).

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan**

Berdasarkan hasil survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.
2. Strata sosial, semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikelompokkan atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.
3. Kelompok Usia, semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat tersebut

#### **F. Strategi Literasi Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) memiliki 3 pilar, dimana pilar dimaksud diuraikan dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif. Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Adapun kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia adalah :

Pilar ke 1 adalah Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, yang di dukung dengan program strategis yaitu menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang meliputi program inisiatif yaitu:

- a. Menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan;
- b. Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi;
- c. Menyusun materi kampanye literasi keuangan;
- d. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum;

- f. Melaksanakan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan (<http://www.ojk.go.id>).

Pilar ke 2 adalah Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, yang didukung dengan program strategis menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang di dukung dengan program inisiatif seperti :

- a. Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye literasi keuangan;
- b. Membangun sarana media komunikasi;
- c. Menyiapkan SDM pelaksana edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksana literasi keuangan;
- f. Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan (<http://www.ojk.go.id>).

Pilar ke 3 adalah Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, yang didukung dengan program strategis yaitu mengembangkan dan memasarkan produk jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan didukung pula dengan program inisiatif seperti:

- a. Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan.
- b. Menciptakan produk dan jasa keuanga yang bersifat *bundling* (sinergi produk dan jasa antar sektor keuangan guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan).
- c. Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas.
- d. Mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (<http://www.ojk.go.id>).

#### **G. Tujuan Literasi Keuangan**

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;

2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan;
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (<http://www.ojk.go.id>).

#### **H. Kajian Pustaka**

Berbicara tentang objek penelitian yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan” sejatinya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti:

Bachtiar Hassan Miraza dalam jurnal Membangun Keuangan Inklusif. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, pengembangan keuangan inklusif seharusnya merupakan tanggung jawab sosial, lembaga keuangan bagi masyarakat kelas bawah/informal yang selalu menjadi bulan-bulanan guncangan ekonomi formal dari dinamika ekonomi formal. Ini tidak menyangkut sentimen formal dan informal tapi menyangkut pada keseimbangan hidup dalam masyarakat dan menyangkut menghidupkan potensi yang tersimpan pada diri masyarakat kelas bawah.

Skripsi oleh Mochammad Zakki Zahriyan (2016) “Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga” hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen keuangan sangat penting yang harus dimiliki pada setiap individu maupun keluarga yang

mana manajemen keuangan sendiri bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap keuangan sehingga terjadi *well literate* atau pengetahuan terhadap keuangan sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan dalam mengelola uang dalam sebuah penggunaan. Manajemen itu sendiri adalah sebuah bentuk dari literisasi keuangan.

Skripsi yang ditulis oleh Frans Julians (2014) yang berjudul *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, konsentrasi, dan indeks prestasi kumulatif. Data dalam Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode kualitatif (deskriptif) Variabel penelitian ada empat, yaitu jenis kelamin, konsentrasi, dan indeks prestasi kumulatif termasuk dalam variabel bebas atau X, sedangkan literasi keuangan termasuk dalam variabel terikat atau Y. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, program studi, dan IPK tergolong dalam kategori tinggi, dengan persentase jenis kelamin 80,75%, program studi 70,5%, dan IPK 74%.

Dalam jurnal Lusardi, Mitchell *The Economics Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*, menerangkan bahwa edukasi terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan manusia yang berwawasan luas dan memiliki pandangan ke depan khususnya dalam pengetahuan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Welly (2014) yang berjudul *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang*. penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi di STIE Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang dapat

disimpulkan bahwa, aspek-aspek dari literasi keuangan diantaranya pengetahuan umum keuangan pribadi, simpanan dan pinjaman, asuransi, dan investasi secara simultan (keseluruhan) memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dosen, karyawan, dan mahasiswa di STIE Multi Data Palembang.

Dalam penelitian skripsi oleh Adib Gusta (2016) yang berjudul “*Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap literasi keuangan di pasar Koga Bandar Lampung. Populasi atau sample dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang ada di daerah Pasar Koga Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang ada di Pasar Koga Bandar Lampung tergolong pada kriteria *well literate*, tingkat gender dan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Kepemilikan akun yang dimiliki para pemilik UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung didominasi oleh produk perbankan.

Studi yang dilakukan oleh Cintiya Meidia Tama dalam skripsinya yang berjudul Studi *Financial Inclusion* dan *Financial Deepening* di Indonesia 2015. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Transaksi ekonomi membutuhkan suatu sistem keuangan yang baik agar tidak salah dalam pemilihan layanan keuangan yang berkembang dimasyarakat yang sifatnya merugikan. Ekspansi layanan keuangan dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan dengan beberapa strategi yang dipergunakan oleh pengambil keputusan, sebangun dengan hal tersebut kondisi perbankan menjadi perhatian khusus yaitu menjaga perbankan dalam keadaan yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik. Oleh sebab itu, strategi *financial inclusion* dan *financial deepening* dianggap tepat dalam merespon masalah keuangan dan melakukan pembangunan keuangan secara kontinyu sehingga menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Amin Hidayat (2017) Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul *Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan*

*Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Studi Kasus di Kantor OJK Purwokerto.* Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran OJK Purwokerto dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Adib Gusta (2016)	Analisis deskriptif tingkat diterasi keuangan pada UMKM di pasar Koga Bandar Lampung	Sama-sama meneliti tentang tingkat literasi keuangan	Perbedaan yaitu penelitian tersebut meneliti pada tingkat literasi keuangan di UMKM
	Mochammad Zakki Zahriyan (2016)	Pengaruh literasi keuangan dan sikap terhadap uang pada perilaku pengelolaan keuangan keluarga	Sama-sama meneliti tentang tingkat literasi keuangan	Perbedaan yaitu penelitian ini mengarah kepada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga
	Frans Julians (2014)	Analisis tingkat literasi keuangan mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Sama-sama meneliti tentang tingkat literasi keuangan	Perbedaan penelitian literasi ini yaitu lebih kepada tingkat literasi mahasiswa
	Welly (2006)	Analisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi di STIE Multi Data	Sama-sama meneliti tentang tingkat literasi keuangan	Perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada keputusan investasi

		Palembang		
	Amin Hidayat (2017)	Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan di Studi Kasus di Kantor OJK Purwokerto	Sama-sama meneliti upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.	Perbedaannya terletak pada subyek penelitian, dimana penulis meneliti upaya OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Sumber: Data Sekunder Diolah.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” (OJK, 2011).

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar Bank Indonesia fokus kepada



pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian (OJK, 2011).

## **B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

### **b. Misi**

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

## **C. Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### **2. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:**

#### **a. Integritas**

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

#### **b. Profesionalisme**

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

### **3. Sinergi**

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### 4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

#### 5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forwardlooking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*) (<http://www.ojk.go.id>).

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal.

Salah satu tugas yang menjadi fokus OJK adalah dengan melaksanakan strategi nasional literasi keuangan yang mana literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola keuangan guna dapat menggunakan keuangan dengan lebih baik.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang

menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategi nasional literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan (<http://www.ojk.go.id>).

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai/diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Wiratna, 2015). Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban-jawaban atas perumusan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

#### 1. Definisi Operasional / Rumusan Masalah

##### A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang di jalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik (Kasmir, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen (<http://www.ojk.go.id>, 2017).

##### B. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di Industri Pasar Modal dan Industri Keuangan non-Bank dilakukan oleh Bapepam-

LK, dan Industri Perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Pengalihan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk Industri Pasar Modal dan Industri Keuangan non-Bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan Industri Perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Di samping itu, pada tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (OJK, 2014).

### **C. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:

#### **1. Amanat Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (OJK, 2014).

#### **2. Perkembangan Industri Keuangan**

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks dan saling terkait.

#### **3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan**

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya, bank memiliki anak perusahaan dalam

bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha jasa keuangan.

#### 4. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di Industri Jasa Keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

Dari hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **D. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar :

- a. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### **E. Lembaga Jasa Keuangan**

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat (1995:1) adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*) misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset riil misalnya: gedung, peralatan, dan bahan baku.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan

sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Totok dan Sigit,2011). Harus diakui jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis.

Dapat dilihat jika negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan pasti tinggi. Oleh karena itu lembaga keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat (Hermansyah:35).

Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa (Totok dan Sigit,2011).

Masyarakat mengenal lembaga jasa keuangan dalam dua bentuk yaitu: bank dan bukan bank. Kedua lembaga ini telah begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pemecah solusi dari setiap masalah yang timbul.

Secara praktis kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai *agent of development*. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja namun lebih dari itu yaitu sebagai pendorong pembangunan.

#### **F. Literasi Keuangan**

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya paham keuangan, menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik (OJK, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau

memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan (Sutrisno, 2004). Penelitian ini diawali dengan adanya hasil survei dari OJK pusat, yaitu melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan. Sedangkan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tandan, atau gambaran tertentu (Sutrisno, 2004). Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## 3. Jenis Data

Menurut jenisnya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti literasi keuangan dalam buku Untuk Indonesia yang Kuat: 100 Langkah untuk Tidak Miskin, Literate, Hananto, Ligwina, 2011, Jakarta.

Untuk mendapat data primer dari penelitian ini, maka penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara *purposive* sampling kepada Karyawan Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis dapat berupa buku-buku, berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan yang menunjang serta



memberikan masukan-masukan yang dapat mendukung penulis untuk lebih menguatkan sumber data penelitian.

#### **4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat kantor: Jalan Ipda Tut Harsono No.12, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

#### **5. Objek dan Subjek Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian, subjek peneliti merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti (Suharsimi, 1992). Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan objek utama dalam penelitian ini adalah Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

##### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, dalam hal ini yaitu Peran OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

##### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus data-data jumlah peningkatan Literasi dari tahun 2011 sampai 2017 berupa dokumen yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

#### **6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.

##### **1. Metode Observasi**

Metode Observasi adalah merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa

atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut dilakukan dengan observasi secara tidak langsung (Wiratna, 2015).

Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah data-data yang diperlukan terkait dengan usaha OJK meningkatkan literasi keuangan. Oleh karena itu, teknik observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan.

## 2. Metode Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam (Wiratna, 2015).

Dalam pelaksanaannya metode studi dokumen akan dilakukan oleh penulis terhadap informan penelitian yaitu oleh Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK DIY (Ibu Asteria Diantika), dan dibantu oleh dua stafnya yaitu Sdri. Yunian Asih Andriyarini dan Sdr. Hendro Wibowo. Dalam penelitian ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Kepala OJK DIY (Bpk. Untung Nugroho).

Metode pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen yang ada dan hasil pemaparan dari surat balasan OJK mengenai literasi keuangan adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian ini, karena data-data yang diperoleh nantinya lebih lengkap dan akurat dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan-informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, internet, dan media lainnya. Data yang diharapkan diperoleh melalui metode ini yaitu mengenai kegiatan program-program OJK DIY dalam meningkatkan literasi keuangan.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan upaya mencari tata hubungan secara sistematis antara kajian buku, analisis isi artikel, catatan hasil lapangan, sampling purposiv dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam model interaktif, analisis data memungkinkan dilakukan pada waktu peneliti berada di tempat penelitian dengan mengenali subjek secara lebih cermat. Berkaitan dengan hal ini, Sudarsono menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan dilakukannya analisis pada waktu peneliti berada di lapangan (*within site, in the field*) maupun sesudah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frasa atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.

Metode Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi buku, teks, artikel, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.

## 8. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confrimability* (obyektivitas). Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini di uji keabsahannya menggunakan teknik bahan referensi. Uji Keabsahan Data Menggunakan Bahan Referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan hasil dokumentasi seperti surat, naskah, jurnal, foto maupun artikel yang di dalamnya terdapat materi OJK DIY mengenai literasi keuangan.

Dalam hal ini peneliti merangkum surat yang di berikan OJK DIY mengenai literasi keuangan bahwa OJK DIY sebagai regulator literasi keuangan akan melaksanakan startegi nasional literasi keuangan Indonesia yang memiliki 3 pilar dan diuraikan ke dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif.

Ketiga pilar tersebut adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrakstrukture literasi keuangan, pengembangan produk dan jasa keuangan. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OJK DIY antara lain:

- 1). Sosialisasi atau Edukasi.
- 2). Seminar.
- 3). Lomba Cerdas Cermat.
- 4). Pasar Keuangan Rakyat.
- 5). Kuliah Umum
- 6). *Press Confrence*
- 7). Ketoprak Humor Waspada Investasi.
- 8). Kunjungan
- 9). Pasar Keuangan Syariah
- 10). *Training of Trainers*
- 11). Gerakan Inklusi Keuangan.
- 12). Talkshow
- 13). *Focus Group Discussion* (FGD)

Dari ketiga pilar Standar Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit SNLKI) pada tanggal 14 Juli 2017, yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia.

Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI (*Revisit 2017*) ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian literasi keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

*Revisit* SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan).

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan bahwa penyesuaian strategi tersebut diperlukan antara lain karena hasil evaluasi selama tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan literasi keuangan masyarakat yang memadai, serta hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016.

Kusumaningtuti menambahkan bahwa indeks literasi keuangan yang sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7% pada

tahun 2016. Hal yang sama juga terlihat pada indeks inklusi keuangan tahun 2013 sebesar 59,7% menjadi 67,8% di tahun 2016.

"Meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami kenaikan, namun perlu dilakukan akselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan," kata Kusumaningtuti. Menurutnya, akselerasi tersebut bertujuan agar target pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Dalam *Revisit* SNLKI terdapat beberapa hal yang tidak terdapat pada SNLKI sebelumnya antara lain informasi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah, layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan," kata Kusumaningtuti. Beberapa hal yang membedakan antara SNLKI 2013 dengan *Revisit* SNLKI diantaranya adalah visi, sasaran, tema prioritas, dan program strategis.

Selanjutnya ketiga program strategis pada *Revisit* SNLKI tersebut dituangkan dalam bentuk program inisiatif yang keseluruhannya berjumlah 6 (enam) program inisiatif. Masing-masing program inisiatif diuraikan secara konkrit dalam bentuk rencana kegiatan (*core action*) yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan sebagai dasar dalam penyusunan program literasi dan inklusi keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Literasi dan Inklusi Keuangan.

Penyusunan *Revisit* SNLKI ini juga mengakomodasi perkembangan konsep literasi dan inklusi keuangan terkini dari berbagai *best practices* internasional antara lain dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), World Bank, *Alliance for Financial Inclusion* (AFI) dan G20.

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Gambaran Umum OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

##### A. Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

##### B. Profil OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir di Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2013 dan membawahi wilayah kerja 4 kabupaten, dan 1 kota yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Pada hari Senin, 2 Februari 2015 Kantor OJK DIY diresmikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Muliaman D. Hadad yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kantor OJK yang baru diresmikan ini beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No.12, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 55165, No. Telp. (0274) 6429170.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sebagai lembaga baru dengan cakupan tugas yang cukup luas, kantor OJK DIY menyadari perlunya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan fungsi, tugas dan wewenangnya. Berbagai kegiatan edukasi telah diselenggarakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap lembaga jasa keuangan.

### **C. Landasan Hukum OJK DIY**

#### **a. Landasan Filosofis:**

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia

#### **b. Landasan Yuridis:**

1. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2. UU No. 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

#### **c. Landasan Sosiologis:**

1. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
2. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (*konglomerasi*) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.



3. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

**d. Visi dan Misi OJK DIY**

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan :

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1). Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2). Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3). Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### 4). Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

#### 5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).

## 2. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan

OJK DIY yang berdiri berdasarkan legalitas dari pemerintah yakni Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Untuk mengetahui peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yaitu dengan melaksanakan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang baru sesuai revisit SNLKI yang sudah ditetapkan sebagai pengganti SNLKI terdahulu, dengan memiliki tujuan sebagai berikut :

### Visi Revisit SNLKI

Adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*).

Masyarakat financial well being adalah masyarakat yang :

- 1.Mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dalam berinvestasi.
3. Serta memiliki ketahanan keuangan.

Visi dalam revisit SNLKI mengalami perkembangan ke arah kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan, dimana masyarakat tidak hanya sebatas memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan namun mampu merubah sikap dan perilaku keuangan

menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, berinvestasi dan memiliki ketahanan keuangan.

Berdasarkan hasil SNLKI 2016 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 38,5% lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 29,7%, dan Indeks Inklusi Keuangan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 76,7% lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 67,8% dan merupakan nomor 2 tertinggi se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target pencapaian untuk inklusi keuangan di Indonesia mencapai 75% pada tahun 2019.

Kegiatan Edukasi di OJK DIY guna mencapai Visi SNLKI adalah :

1. Penyelenggaraan Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan di Bulan Ramadhan, yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 16 Juni 2017.
  - Latar belakang diselenggarakannya kegiatan Talkshow ini masih kurangnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap produk/ jasa keuangan. Terutama pada bulan Ramadhan yang kebanyakan kebutuhan pokok/sembako seperti (daging,sayur,cabe,beras bawang) naik signifikan dari harga normal sehari-hari.
  - Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan serta mengajak masyarakat untuk menyikapi lebih baik kenaikan harga pokok/sembako pada saat bulan Ramadhan.
2. Penyelenggaraan sosialisasi Gerakan Menuju Hidup Sejahtera tanpa Rentenir, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2017.
  - Latar belakang diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk/jasa keuangan. Hal ini berakibat banyaknya masyarakat yang masih menggunakan jasa bank plecit. Hal ini yang menimbulkan OJK harus melakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa agar dapat menjaga dan mengingatkan masyarakatnya untuk lebih baik dalam menyikapi produk jasa keuangan.
  - Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan serta mengajak untuk lebih

memahami produk-produk lembaga jasa keuangan yang baik. Sehingga masyarakat tidak mudah tergoda dengan tawaran investasi menggiurkan dengan bunga dan iming-iming keuntungan berlipat yang dilakukan oleh bank plecit/rentenir.

3. Penyelenggaraan sosialisasi Edukasi Literasi Keuangan dengan tema “Membangun Generasi Millennial yang Cerdas Finansial” yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2017.

- Latar belakang diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah semakin berkembangnya pertumbuhan teknologi yang sangat pesat sehingga berdampak pada masyarakat luas khususnya para remaja. Kaum Millennial/Remaja saat ini bergantung pada kemajuan teknologi yang sangat pesat, dan rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi untuk kegiatan layanan jasa keuangan. Generasi Millennial ini lahir diantara tahun 1980-2000.
- Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat khususnya generasi millennial/remaja tentang sikap dan perilaku dalam menggunakan teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini.

Sehingga dengan kemajuan teknologi, generasi millennial/remaja mampu menggunakan layanan dan program produk jasa keuangan dengan baik dan benar.

#### **Misi Revisit SNLKI**

Adalah semakin luas dengan menambahkan sasaran pemuda, sasaran penyandang disabilitas, masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar, TKI dan Calon TKI, petani dan nelayan serta mengubah penyebutan ibu rumah tangga menjadi perempuan.

Penambahan sasaran dalam Misi revisit SNLKI ini mempertimbangkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, agar revisit SNLKI ini sejalan dengan peraturan tersebut.

Ada 10 sasaran yang menjadi prioritas utama dalam revisit SNLKI, yaitu;

1. Perempuan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Profesi
4. Karyawan
5. Pelajar / mahasiswa / pelajar
6. Pensiunan
7. Penyandang disabilitas
8. Masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar
9. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
10. Petani dan nelayan.

Kegiatan edukasi guna mencapai Misi SNLKI adalah :

1. Penyelenggaraan OJK Peduli dan sosialisasi kepada Tuna Netra, dengan tema “Pengenalan Tugas dan Fungsi OJK” yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2017.
  - Latar belakang diselenggarakannya kegiatan OJK Peduli dan sosialisasi kepada Tuna Netra ini adalah bentuk kepedulian OJK terhadap masyarakat khususnya Tuna Netra dimana masih rendahnya pemahaman dan produk jasa keuangan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Tuna Netra diharapkan bisa mengetahui dan memahami produk dan layanan jasa keuangan.
  - Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Meskipun kaum Tuna Netra juga harus mendapatkan layanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memberikan motivasi lebih agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri meskipun dengan keterbatasan mereka.
2. Penyelenggaraan OJK Peduli dan sosialisasi kepada anak TK dan Paud, dengan tema “Pengelolaan Keuangan” yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2017.
  - Latar belakang diselenggarakannya kegiatan OJK Peduli dan sosialisasi kepada anak-anak TK dan Paud adalah bentuk kepedulian OJK terhadap masyarakat sejak dini yang dimulai dari anak-anak TK dan Paud untuk belajar memahami produk dan layanan jasa keuangan.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan sejak dini kepada anak-anak tentang produk dan layanan jasa keuangan. Dengan demikian akan mewujudkan generasi masyarakat yang melek keuangan.
3. Penyelenggaraan sosialisasi Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan kepada Kelompok Wanita Tani Kabupaten Kulon Progo, dengan tema “Pengenalan OJK, EPK dan Waspada Investasi serta Pengenalan produk dan Lembaga Asuransi” yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2017.
- Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya pada daerah pelosok terhadap produk lembaga jasa keuangan dan Investasi keuangan. Dimana masyarakat pada daerah tersebut kebanyakan menjadi buruh/petani baik pria ataupun wanita.
  - Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap produk dan layanan jasa keuangan, khususnya Investasi, Investigasi Perbankan dan Lembaga Asuransi. Dengan demikian masyarakat dapat memilih produk, layanan jasa keuangan, investasi, investigasi perbankan dan lembaga asuransi yang baik dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga mampu meminimalisir tertipunya masyarakat khususnya pedesaan/pelosok terhadap investasi bodong.
4. Penyelenggaraan Workshop Membina UMKM yang sukses melalui Edukasi Keuangan Kepada Pelaku UMKM di Kabupaen Bantul, dengan tema “Pengenalan Tugas dan Fungsi OJK, Bidang EPK, Waspaada Investasi, Peran Akses Keuangan Perbankan, dan Strategi Marketing” yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2017.”
- Latar belakang diselenggarakannya workshop membina UMKM ini adalah banyaknya pelaku usaha baik lama atau baru yang mayoritas semua termasuk kedalam usaha mikro kecil dan menengah. Dimana pelaku usaha masih rendah pengetahuannya tentang produk dan layanan jasa keuangan serta bagaimana cara menyikapi uang dengan baik dan benar.
  - Tujuan dari kegiatan adalah memberikan wawasan dan pengetahuan lebih kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

tentang produk dan layanan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar serta dapat membedakan produk dan layanan jasa keuangan yang legal/ilegal. Dengan hal tersebut akan meminimalisir kejahatan yang biasa ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan menengah diantaranya tentang tindak penipuan uang atau investasi bodong.

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengembangan produk yang dilakukan OJK bersama LJK sudah tepat di mana pengembangan produk tersebut dapat menyentuh kepada masyarakat kecil, namun ada yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan produk jasa keuangan yang dapat menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan agar lebih mudah diperoleh masyarakat.

Kedepannya OJK Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun program kerja dalam rangka literasi keuangan masyarakat dengan segmen karyawan, pensiunan, pelajar dan profesi lainnya. Diantaranya adalah edukasi UMKM di beberapa kabupaten, edukasi kepada petani dan nelayan, OJK mengajar di sekolah, gerakan inklusi keuangan dalam bentuk desa inklusi keuangan di 4 kabupaten, sosialisasi kepada ibu rumah tangga.

#### **Program Strategis Revisit SNLKI**

Program utama dalam kerangka dasar *Revisit* SNLKI terdiri dari 3 (tiga) program yaitu:

Program strategis 1 Cakap Keuangan.

- Program Inisiatif 1.1

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

- Program Inisiatif 1.2

Mengembangkan Infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Program strategis 2 Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak.

- Program Inisiatif 2.1

Mendorong masyarakat untuk memiliki tujuan dan perencanaan keuangan.

- Program Inisiatif 2.2

Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat.

Program strategis 3 Akses Keuangan

- Program Inisiatif 3.1

Memperluas dan mempermudah akses masyarakat ke sektor jasa keuangan.

- Program Inisiatif 3.2

Menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerangka dasar dalam revisit SNLKI dibentuk berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dituangkan dalam tiga (3) program strategis utama yaitu :

1. Cakap Keuangan, agar masyarakat memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan terhadap sektor jasa keuangan.
2. Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, agar masyarakat memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik.
3. Akses Keuangan, agar masyarakat dapat mengakses ke sektor jasa keuangan. Penjelasan detail atas program strategis dimaksud dituangkan dalam bentuk program inisiatif dan rencana kegiatan (*Core Action*) yang memuat penjelasan lebih teknis.

Kegiatan Edukasi guna mencapai Program Stategis SNLKI adalah :

1. Penyelenggaraan sosialisasi kepada guru SMA, dengan tema “Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Literasi Keuangan, Pengenalan Tugas dan Fungsi OJK dalam bidang EPK dan Waspada Investasi” yang di selenggarakan pada tanggal 20 September 2017.
  - Latar belakang diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah masih kurangnya pengetahuan guru terkait dengan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena guru sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi muda guna membangun sikap dan perilaku seseorang.
  - Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang fungsi dan tugas OJK, serta bagaimana memilih perusahaan investasi



yang baik dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini guru adalah hal pokok dan kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan masyarakat dimasa yang akan datang. Sehingga seorang guru di tuntut agar dapat memberikan pemahaman secara jelas kepada siswa didik supaya kedepannya dapat menjadi generasi muda yang cerdas dalam berbagai bidang khususnya sektor jasa keuangan.

2. Penyelenggaraan sosialisasi *Training of Trainers* terhadap guru SMA dan MA se-DIY, dengan tema “Pengenalan Tugas dan Fungsi OJK, Perbankan Konvensional & Syariah, Dana Pensiun, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan dan Pasar Modal” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017.

- Latar belakang diselenggarakannya acara *Training of Trainers* ini adalah rendahnya kemampuan seorang guru dalam memberikan teori/pembelajaran kepada siswa khususnya pada bidang ekonomi dan perbankan, sehingga pemahaman siswa dalam menerima ilmu yang diberikan juga terbatas. Dalam hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba memberikan terobosan atau pelatihan *Training of Trainers* kepada seluruh guru SMA & MA se-DIY yang kemudian agar ilmu dan pemahaman yang diterima dapat di berikan kepada siswa pada saat proses pembelajaran di kelas.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seorang guru khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan, yang di kemudian hari ilmu yang diperoleh agar dapat diberikan kembali kepada siswa/siswi. Hal tersebut dikarenakan peran seorang guru sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi muda guna membangun sikap dan perilaku seseorang. Dalam membantu tugas seorang guru, OJK telah meluncurkan “Buku Literasi Keuangan” pada Tahun 2014, yang termasuk dalam buku tersebut adalah pembelajaran mulai dari Buku SD, SMP, dan SMA. Dalam buku tersebut sudah terdapat berbagai macam materi terkait OJK dan Lembaga Jasa Keuangan.

Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada program strategis dalam Revisit SNLKI ini perlu ditingkatkan dalam program kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan edukasi literasi keuangan yang lebih efektif dan efisien yang optimal dan

berkesinambungan, tidak hanya dengan perguruan tinggi saja melainkan dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya, menjalin kerjasama dengan komunitas - komunitas masyarakat, buruh dan lain sebagainya.

### **Program inisiatif *Revisit* SNLKI**

Tidak lagi ditentukan langsung dalam beberapa tahun ke depan untuk melakukan sosialisasi/edukasi terhadap masyarakat namun akan ditentukan oleh OJK berkolaborasi dengan Industri Jasa Keuangan di akhir tahun berdasarkan pada program pemerintah dan hasil evaluasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memperhatikan :

- Kesamaan dan kebutuhan literasi dan inklusi keuangan.
- Program pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perubahan penentuan tema prioritas pada revisit SNLKI ini mempertimbangkan hasil evaluasi kegiatan edukasi pada tahun sebelumnya agar program edukasi keuangan sejalan dengan program pemerintah dan OJK serta sesuai dengan prioritas Industri Jasa Keuangan pada tahun tertentu.

Kegiatan edukasi guna mencapai Program Inisiatif SNLKI adalah :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi Peningkatan Literasi Keuangan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Purna TKI di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tema “Pengenalan Tugas dan Fungsi OJK, dan Bidang EPK, Pengenalan Produk Perbankan oleh PT BNI, Pengelolaan Keuangan oleh *financial planned*” yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017.
  - Latar belakang di selenggarakannya sosialisasi ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan guna meningkatkan literasi keuangan di masa yang akan datang. Pengenalan produk perbankan ini bekerjasama dengan PT Bank BNI, Tbk.
  - Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya TKI tentang berbagai macam produk dan layanan jasa keuangan. Serta bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik guna meningkatkan literasi keuangan pada diri setiap masyarakat. Bertambahnya pemahaman

masyarakat tentang produk layanan perbankan terbaru yang dilakukan oleh PT Bank BNI, Tbk. guna menarik masyarakat untuk menggunakan jasa bank dalam kegiatan sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh hasil dari kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan PT Bank BNI, Tbk. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Serta peningkatan literasi yang diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan masyarakat yang diharapkan agar tumbuh pada setiap tahunnya.

Untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan mobil literasi keuangan atau biasa disebut dengan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK). Peluncuran pertama dilakukan pada tahun 2013 sebanyak 20 unit, kemudian pada tahun 2015 OJK kembali meluncurkan mobil SiMOLEK sebanyak 21 unit sehingga total semua adalah 41 unit SiMOLEK. Mobil ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui edukasi keuangan. Dimana edukasi tersebut dilakukan kepada seluruh masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu mengelola keuangannya dengan baik guna kesejahteraan hidupnya. OJK menyuguhkan Berbagai fitur dan fasilitas pada SiMOLEK yang bisa dinikmati oleh masyarakat yaitu bahan mengenai edukasi keuangan mengenai produk, layanan dan lembaga jasa keuangan, fasilitas finansial health check untuk mengetahui kondisi atau status keuangan seseorang atau keluarga.

Kondisi infrastruktur daerah di Indonesia yang masih belum merata menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat di berbagai daerah pelosok untuk memperoleh layanan jasa keuangan. Oleh karena itu dengan Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) diharapkan mampu meminimalisir hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan lembaga keuangan. Dalam kinerjanya SiMOLEK mengunjungi pasar-pasar dan sekolah-sekolah, karena SiMOLEK ini juga berfungsi seperti perpustakaan keliling khusus memberikan informasi jasa keuangan. Selain itu target utama dari program edukasi keuangan OJK saat ini yaitu ibu-ibu rumah tangga dan pengusaha mikro dan kecil di pasar-pasar tradisional. Dengan edukasi yang diberikan oleh OJK diharapkan para ibu

rumah tangga mampu mengelola masalah keuangan rumah tangganya dengan baik sehingga bisa sejahtera.

SiMOLEK dilengkapi oleh fitur dan fasilitas yang cukup lengkap sehingga ketika berkunjung ke daerah terpencil atau pelosok yang terbatas oleh aliran listrik tidak akan khawatir karena didukung oleh mesin genset. Jadi hal tersebut tidak menjadi hambatan oleh SiMOLEK untuk tetap mendatangi masyarakat. Hadirnya SiMOLEK ditengah-tengah masyarakat ini selain bertujuan meningkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan jasa keuangan juga memberikan tata cara mengelola keuangan. Sehingga dengan pengetahuan yang sudah didapatkan diharapkan masyarakat akan terhindar dari investasi yang salah atau investasi bodong. Karena biasanya investasi bodong selalu mencari korban dari golongan masyarakat yang kurang literasi keuangannya. Keberadaan SiMOLEK ini memang sangat membantu masyarakat di daerah pelosok. Kepedulian dan kepekaan pemerintah memang harus ada, agar masyarakat kecil juga bisa sejahtera hidupnya tidak hanya masyarakat yang ada diperkotaan yang diperhatikan. Tidak ada kesenjangan diantara orang kaya dan orang miskin, semua masyarakat hidup sejahtera, maka bisa dikatakan negara tersebut merdeka.

OJK DIY selain melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, juga melakukan tugas edukasi dan perlindungan konsumen. OJK telah melaksanakan 79 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang ditunjukan kepada UMKM, pelajar/ mahasiswa, tuna netra, guru, PNS, dosen, kelompok profesi dan masyarakat lainnya. Selain itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan dimaksud, OJK menginisiasi pembentukan beberapa program antara lain:

**A. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)**

Pembentukan TPAKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 16 Mei 2016 dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 500/375/2016 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur DIY pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di Kantor Gubernur, Bangsal Kepatihan Danurejan Jl. Malioboro No.16, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213.

**Tabel 4.1****Struktur Organisasi TPAKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
I	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Pengarah I	Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY
	Pengarah II	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta
III	Koordinator	Sekretaris Daerah DIY
IV	Sekretaris I	Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY
	Sekretaris II	Kepala Biro Administrasi dan SDA Setda DIY
V	Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
		Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Kepala Dinas Pendapatann, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
		Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
		Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY
		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
		Kepala Dinas Sosial DIY
		Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
		Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda DIY
		Ketua Tim Ekonomi dan Keuangan Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta
		Kepala Budan Pusat Statistik DIY
		Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) DIY
		Ketua Perhimpunan Bank Perkreditam Rakyat Indonesia (Perbarindo) DIY
		Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) DIY
		Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) DIY
		Pengurus Forum Industri Jasa Keuangan DIY
		Kepala Bank Pembangunan Daerah DIY
		Rektor Universitas Gadjah Mada
		Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
		Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
		Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY

		Ketua Badan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Keuangan DIY
VI	Sekretariat	Staf Bagian Pengawasan IndustriKeuangan Non Bank, Penanaman Modal, dan Edukasi Perlindungan Konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY
		Staf Bagian Bina Kapasitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
		Staf Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD):

- Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
- Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
- Mendorong jasa keuangan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ekonomi daerah.
- Menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
- Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah, usaha pemula (Start Up Business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
- Melakukan koordinasi antara satuan kerja daerah dalam satu wilayah kerja serta bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah di wilayah lainnya, kantor regional/kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam wilayah provinsi, kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya untuk menjamin perluasan akses keuangan.

Dari susunan struktur organisasi dalam TPAKD masing-masing pengurus memiliki tugas masing-masing, antara lain:

1. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Menetapkan arah kebijakan percepatan akses keuangan daerah.
  - b. Mengambil keputusan yang bersifat strategis.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan strategis.
  - b. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan.
  - c. memimpin rapat Tim.
  - d. Menyelenggarakan program kegiatan Tim.
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur.
3. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim dengan dibantu oleh sekretaris.
  - b. Menyusun rencana kegiatan Tim.
  - c. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
4. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
  - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
  - d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah.
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
  - f. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di daerah.
  - g. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di daerah.
  - h. Melakukan pertemuan koordinasi Tim minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
  - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur.

## **B. Pembentukan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang dana masyarakat dan investasi (Satgas Waspada Investasi)**

Satgas Waspada Investasi merupakan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum, dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 27/KDK.01/2016, dan pada tanggal 30 Agustus 2016 dilakukan pengukuhan pengurus Satgas Waspada Investasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Aula Hotel Aston Yogyakarta.

Latar belakang dibentuknya satgas ini dikarenakan banyaknya praktek berkedok investasi tak berizin di masyarakat dan cenderung mengakibatkan kerugian materil dan berdampak negative terhadap produk investasi yang punya legalitas perizinan dari regulator atau pengawas.

Program tersebut dilakukan dalam setahun dengan dibagi menjadi program triwulanan. Secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada program edukasi yang di buat sudah baik dengan berbagai bentuk program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, agar program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan dapat berjalan efektif dan menyeluruh secara optimal maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih. Hal ini dikarenakan wilayah kerja kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sangat luas. Dengan meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta).

Pembentukan satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum (Satgas Waspada Investasi) di Yogyakarta di bentuk pada tanggal 3 November 2016. Yang dikukuhkan Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tim yang terdiri dari sembilan instansi di antaranya OJK, Pemerintah Daerah DIY, Kejaksaan Tinggi, Polda DIY, dan Kanwil Kementerian Agama DIY ini diharapkan bisa memberikan jaminan keamanan berinvestasi.

Dijelaskan Ketua Kantor OJK DIY, Dr Fauzi Nugroho, pembentukan Tim Satgas Waspada Investasi ini diilhami maraknya investasi bodong. Selama ini, munculnya bisnis investasi tidak berizin selalu merugikan masyarakat. Dengan terbentuknya Tim Satgas Waspada investasi ini diharapkan bisa lebih intens untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas memilih investasi yang berkualitas.



Selama ini Otoritas Jasa Keuangan DIY telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak terpicat dengan investasi bodong. Dengan media yang digunakan, diantaranya:

- Pagelaran ketoprak yang digelar di 4 yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul, juga media lain.
- Talkshow Waspada Investasi
- *Training of Trainers* terhadap Guru SMA & MAN Se DIY

Sedangkan menurut Firdaus Djaelani (Anggota Dewan Komisiner OJK), ciri-ciri investasi bodong adalah memberi iming-iming hasil yang tinggi atau tidak rasional. Dalam menggaet nasabah, investasi bodong menggunakan cara-cara yang cukup menyentuh dan bisa membuat masyarakat awam menjadi percaya. Salah satunya ada tokoh masyarakat seperti, anggota TNI dan Polri, dan pejabat lainnya. Adanya tokoh masyarakat, anggota TNI dan Polri ini seolah-olah investasi itu dilindungi mereka. Sehingga masyarakat percaya.

Tim Satgas Waspada Investasi DIY yang merupakan Satgas ke-24 diharapkan dapat melindungi masyarakat agar bisa memilih investasi baik. Selama ini, para korban investasi bodong enggan untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib. “Mereka orang berduit dan merasa malu jika melaporkan kasusnya,” katanya.

Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pengukuhan Tim Satgas Waspada Investasi diharapkan pengelolaan investasi di wilayah DIY bisa terkoordinasi. Sehingga bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat. Secara lebih lanjut Sultan mengatakan adanya Bandara Internasional di Kulonprogo akan menumbuhkan investasi yang lebih banyak. Apalagi nanti ada pembukaan jalur baru Bandara menuju Borobudur tentu akan menumbuhkan investasi baru.

### **C. Pembentukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)**

Forum yang menjadi wadah persatuan Industri Jasa Keuangan ini dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku Industri Jasa Keuangan. Peresmian FKIIJK dilakukan dalam Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di bangsal Kepatihan, Kompleks kantor Gubernur DIY, Kamis malam 11 Februari 2016. Rencananya FKIIJK akan diresmikan oleh Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X. Namun karena Gubernur DIY berhalangan hadir kemudian digantikan oleh Sekda DIY, Ichsanuri. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong, acara kemudian dilanjutkan dengan program OJK Mendengar.

Seperti yang dikutip oleh tribunnews.com, dalam kesempatan tersebut Kepala OJK DIY, Fauzi Nugroho mengatakan, OJK bersama para pelaku telah membentuk forum ini pada tanggal 21 Desember 2015 pada saat pertemuan dengan seluruh Industri Jasa Keuangan di Kantor OJK DIY. "Pembentukan forum tersebut diharapkan menjadi wadah persatuan industri jasa keuangan untuk mengantisipasi dan mencari solusi permasalahan lintas industri jasa keuangan serta media untuk memahami stakeholder. Sementara itu, Ichsanuri mengatakan, forum ini sangat baik untuk mengatasi berbagai persoalan khususnya dalam skala makro. "Hanya saja, tentunya forum harus berkelanjutan," katanya.

Fauzi menyambung, setelah terbentuknya FKIIJK, pihaknya juga berencana membentuk Forum Komunikasi Pembangunan Ekonomi Daerah (FKPED). Forum ini diharapkan dapat menjalin koordinasi antara OJK dengan aparatur daerah untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian daerah secara mandiri. "Juga dalam rangka melindungi masyarakat DIY dari penawaran investasi bodong, kami telah mengajukan usulan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan Fatwa MUI terkait dengan investasi bodong. Saat ini MUI sedang melakukan pembahasan secara intensif rencana tersebut," ungkapnya.

Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat luas terhadap kemungkinan penawaran investasi bodong, lanjut Fauzi, pihaknya juga berencana melaksanakan sosialisasi waspada investasi dalam bentuk ketoprak humor keliling empat kabupaten di DIY.

"Kami juga akan menyusun buku panduan keuangan dalam Bahasa Jawa untuk memberikan acuan penggunaan jasa keuangan secara sederhana kepada kelompok masyarakat yang kurang memahami bahasa Indonesia."

### **3. Analisis Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat**

Untuk mengetahui peran OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat dilakukan wawancara terhadap

para karyawan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai peran OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan adalah sebagai berikut:

**A. Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai Program**

Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan semakin gencar dilakukan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kemampuan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga informasi mengenai kegiatan tersampaikan. Masyarakat harus diberi pengertian mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan baik individual maupun kelompok. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dalam khususnya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi atau edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber data dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

OJK Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan dengan berbagai cara yang dilakukan yakni dengan:

**a. Sosialisasi dan edukasi**

Sosialisasi mengenai literasi keuangan telah melaksanakan 79 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang diantaranya ditujukan kepada UMKM, pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, guru, PNS, dosen, kelompok profesi dan masyarakat lainnya.

**b. Melalui Media Massa**

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Media elektronik menggunakan radio ataupun stasiun televisi lokal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dapat termuat di koran-koran atau media cetak. Di bagian internal OJK sendiri juga

memiliki majalah yaitu Majalah Blangkon yang hanya untuk kalangan internal OJK dan Industri Jasa Keuangan Yogyakarta saja.

Salah satu berita yang termuat di media cetak Harian Jogja (Harjo) adalah berita kegiatan dalam rangka mengenalkan Pasar Modal kepada masyarakat dengan mengadakan Lomba Stocklab. Tingkat literasi pasar modal di Indonesia masih cukup rendah, yaitu sekitar 0.11%. Angka tersebut cukup rendah jika di dibandingkan dengan tingkat literasi lembaga keuangan lainnya seperti perbankan. Fauzi Nugroho selaku kepala OJK DIY mengatakan, pasar modal menjadi diversifikasi keuangan di Indonesia. Namun, butuh upaya yang tinggi untuk bisa mengenalkannya kepada masyarakat. Keberadaan permainan Stocklab menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan investasi pasar modal pada masyarakat, terutama anak muda.

Stocklab menjadi peraga investasi pasar modal yang dapat di mainkan dalam bentuk kartu. Dalam kartu tersebut ada istilah pasar modal dan bentuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disederhanakan sehingga mudah dimengerti masyarakat. Pemain yang terdiri dari 4-6 orang berlomba mengumpulkan uang terbanyak dari hasil investasi pada produk-produk pasar modal. Nilai edukasi pada permainan ini terletak pada istilah-istilah pasar modal tersebut sehingga para pemain bisa mengenal tentang pasar modal dan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham.

Dari 140 peserta akan diambil dua pemenang dan akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Tujuan dari lomba stocklab ini adalah untuk memahami pasar modal melalui permainan karena selama ini kata-kata dirasa susah dimengerti. Permainan ini di desain mendekati real bursa, sehingga benar-benar di desain bagi yang belum tahu pasar modal.

**c. Secara langsung**

Sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui 2 sistem yaitu, Pertama, sosialisasi secara langsung yang dilakukan olehkaryawan OJK kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. *Kedua*, masyarakat yang berkonsultasi secara langsung datang ke kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi melalui pembentukan program literasi keuangan**

Tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan mengubah sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan literasi keuangan OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di setiap kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah forum koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Hadirnya TPAKD ini bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat daerah. Selain itu TPAKD akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Sampai saat ini baru terbentuk satu TPAKD tingkat provinsi dan dua TPAKD tingkat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diantaranya meliputi, TPAKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dikukuhkan oleh Gubernur DIY pada tanggal 24 Mei 2016, TPAKD Kabupaten Gunungkidul yang telah dikukuhkan oleh Bupati Gunungkidul pada tanggal 13 November 2017, dan TPAKD Kabupaten Kulon Progo yang telah dikukuhkan oleh Wakil Bupati Kulon Progo 14 November 2017.

Program TPAKD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode memilih 1 desa binaan inklusi keuangan sebagai *pilot project*, kemudian desa tersebut menjadi fokus seluruh anggota tim yang berasal dari masing-masing instansi untuk meningkatkan akses keuangan dan perekonomian. Untuk TPAKD Daerah Istimewa Yogyakarta memilih Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari,

Kabupaten Gunungkidul sebagai desa binaan inklusi keuangan dengan misi menjadikan desa tertinggal menjadi desa terdepan dalam inklusi keuangan. TPAKD Kabupaten Gunungkidul menjadikan Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunungkidul sebagai desa binaan inklusi keuangan, dan Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap Kulon Progo dipilih oleh TPAKD Kulon Progo sebagai desa binaan inklusi keuangan.

Pada tahun 2016-2017 kegiatan TPAKD yang dilakukan antara lain:

- a. Dialog Kepala OJK dengan warga Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- b. *Training of Trainer* Ketua RT Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- c. Workshop TPAKD DIY;
- d. Kunjungan dan Dialog oleh seluruh anggota TPAKD di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- e. Gerakan Inklusi Keuangan di Kecamatan Gedangsari;
- f. *Focus Group Discussion* TPAKD DIY;
- g. Program KKN Tematik yang bekerjasama dengan Universitas UPN Veteran Yogyakarta;
- h. Pengumpulan Data di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- i. Peresmian Omah Literasi Keuangan di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- j. Lomba Fotografi “OJK-Gedangsari Photohunt” di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- k. Literasi OJK kepada TK PKK Mertelu dan pemberian jamban sehat di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
  - l. *Coaching Clinic* TPAKD;
- m. Kunjungan dan Dialog Kepala OJK di Desa Kalirejo dan Desa Sidomulyo, Kulon Progo;
- n. Literasi Keuangan oleh Industri Jasa Keuangan yang dilakukan secara bergilir di Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul;
- o. Pembuatan Omah Literasi Keuangan di Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.

### C. Sinergi Program atau Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak

Sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu supaya dalam program yang dilaksanakan lebih optimal dan menimbulkan citra yang baik. Saat ini OJK Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melaksanakan berbagai program yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial diantaranya:

1. Melaksanakan Pasar Keuangan Rakyat, perhelatan yang bertajuk Pasar Keuangan Rakyat 2016: Menuju Indonesia Cerdas Keuangan itu diselenggarakan pada 29-30 Oktober 2016 yang bertempat di Atrium Mal Malioboro Yogyakarta. Pasar Keuangan Rakyat ini diselenggarakan untuk memasyarakatkan beragam pilihan produk dan jasa keuangan yang disediakan jasa keuangan serta mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan. Tujuan lain yakni membudayakan menabung di kalangan masyarakat. Hal ini untuk mendukung target pemerintah DIY bahwa pada tahun 2023, 100% masyarakat DIY melek keuangan.

Pameran yang menjadi bagian strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI). Kegiatan ini diikuti oleh dari industri perbankan seperti BRI, BPD DIY, Mandiri, BNI, dan beberapa BPR di DIY, kemudian perusahaan asuransi, pegadaian, dan pasar saham.

2. Sosialisasi kepada Perangkat Desa di Gunungkidul, yang dilaksanakan di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2016, dengan tema Sosialisasi “Gerakan Menuju Hidup Sejahtera tanpa rentenir”. Mewaspada Investasi Bodong dan rentenir, sosialisasi ini bertujuan Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan serta mengajak untuk lebih memahami produk-produk lembaga jasa keuangan yang baik. Sehingga masyarakat tidak mudah tergoda dengan tawaran investasi menggiurkan dengan bunga dan iming-iming keuntungan berlipat yang dilakukan oleh Bank Plecit/Rentenir.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan karyawan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan Peran Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan menggunakan 3 program strategi OJK dalam Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) memiliki 3 program, dimana program dimaksud diuraikan dalam 3 program strategis dan 6 program inisiatif, ketiga program ini merupakan revisi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Pemilihan segmen masyarakat yang akan disasar dipilih secara bebas dan bergantian. Pada revisit SNLKI 2017 ini dinilai lebih fleksibel dan segmen yang berada dalam SNLKI lebih luas. Untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi yang akan dilakukan dapat menyesuaikan kondisi pada setiap daerah masing-masing. Dalam melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng komunitas dari mahasiswa yang biasa disebut Generasi Cerdas Keuangan (GCK).

Harapan kedepannya setelah adanya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK DIY kepada masyarakat, akan bisa menambah pemahaman masyarakat tentang literasi dan produk jasa keuangan serta pemahaman masyarakat akan literasi keuangan menjadi lebih baik dari sebelumnya.



## Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Penulis memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya proses edukasi terhadap konsumen lebih dapat diterima baik oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan program edukasi yang dilakukan oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Namun menurut pengamatan penulis, pelaksanaan program edukasi perlu ditingkatkan lagi dari mulai program, daerah jangkauan, dan masyarakat sasaran edukasi sehingga pemahaman akan tingkat literasi keuangan dapat menyeluruh dan merata di segala aspek. Beberapa hal yang menjadi masukan dari penulis antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas edukasi konsumen terhadap masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan.
2. Pemberian edukasi mengenai produk jasa keuangan agar dapat menyeluruh kesemua golongan masyarakat. Perlu ditingkatkan kembali program-program edukasi dengan aspek jangkauan masyarakat yang lebih menyeluruh sehingga pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan lebih baik dan terwujud masyarakat yang *well literate*.
3. Pemberian literasi keuangan kepada masyarakat harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai risiko produk dan layanan konsumen agar masyarakat terhindar dari investasi bodong.
4. Selain pemberian edukasi dan literasi keuangan juga diberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, budaya menabung, dan berinvestasi agar masyarakat dengan pola hidup konsumtif semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal. 2004. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Gusta, Adib. 2016. *Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Laporan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Jilid I*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Helms, Brigit. 2006. *Access for All, Building Inclusive Financial System*. The World Bank, Washington, D.C.
- Hermansyah, op. cit., hlm. 35.
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/LiterasiKeuangan.aspx>.
- Hasil Wawancara dengan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta  
<http://www.solopos.com/2016/05/24/pertumbuhan-ekonomi-diy-tim-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-dibentuk-ini-tugas-mereka-722459>  
<http://www.jognews.com/bisnis/323-tim-satgas-waspada-investasi-diy-dikukuhkan>  
<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan)  
<https://www.finansialku.com/apa-itu-inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan>
- Julians, Frans. 2014. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Pekanbaru, Riau: Universitas Syarif Kasim Riau.
- Kasmir. Ed Revisi 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krishna, Ayu, Rofaida, Rofi, Sari, dan Maya. 2010. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*.
- Krishna. 2014. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Proceeding of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung)*. Bandung: UPI dan UPSI Bandung.
- Mirza, Bahchtiar Hassan. *Membangun Keuangan Inklusif*. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Mitchell, Lusardi. 2017. *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Seri Literasi Keuangan OJK*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Surat Edaran SP109/DKNS/OJK/X/2016*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam laman <http://www.ojk.go.id>.

RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan, BAB II, Pasal 2 dan 3.

Suara Merdeka Cetak, desember 15, 2016., *2018 Literasi Keuangan Capai 30%*, Di akses pada tanggal 29/05/2017 pada pukul 9:09

"*SBY Resmikan Blueprint Literasi Keuangan*" dalam laman [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

TRIBUNJOGJA.COM

Tama, Cintiya Meidia. 2015. *Studi Financial Inclusion dan Financial Deepening di Indonesia*.

Trihandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahid, Nusron. 2014. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Gramedia.

Welly. 2014. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang*. Palembang: Universitas STIE Data Palembang.

Widayati, Irin. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, *Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Malang: Universitas Brawijaya.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Zahriyan, Mochammad Zakki . 2016. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.